JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 3 No. 3, Desember 2024
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

UMKM SEBAGAI PILAR DALAM MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nur Hikmah Mustari

[1] Politeknik STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRACT

Basically, Indonesia's population increases every year. High population density has the potential to cause economic instability in meeting the needs of the community. Therefore, the government is required to realize its obligations in realizing community welfare through economic policies that emphasize equality, management of increasing population growth, and development of human resource quality. This study uses a literature study by collecting digital library data, websites, and library journal connections according to the research topic keywords: MSMEs, Economic Growth, and Pillars of Community Welfare. The results of this study indicate that one of the supporting tools in supporting economic growth to improve community welfare is MSMEs, because they are able to absorb 97% of the total workforce and contribute 61% to GDP. Even the 1997-1998 economic crisis MSMEs showed higher resilience than large companies. However, the government needs to develop MSMEs considering that the population is 4th in the world. By simplifying regulations and permits, access to financing, management training, increasing technological capacity, and expanding market access are very necessary. The goal is to encourage economic equality, expand employment opportunities, reduce income disparities, and improve public welfare. So that people can more easily access public services, and improve their standard of living. This is also a concrete step in realizing economic democracy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: MSMEs, Economic Growth, Pillars of Community Welfare

ABSTRAK

Pada dasarnya, penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kepadatan penduduk tinggi berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah dituntut untuk menrealisasikan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada pemerataan, pengelolaan pertumbuhan populasi yang kian meningkat, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pengumpulan data *digital library*, situs web, dan koneksi jurnal perpustakaan sesuai kata kunci topik penelitian: UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pilar Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu alat penopang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah UMKM, karena mampu menyerap 97% total tenaga kerja dan menyumbang PDB 61%. Bahkan krisis ekonomi 1997-1998 UMKM menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Namun, pemerintah perlu mengembangkan UMKM mengingat jumlah penduduk berada ke-4 di dunia. Dengan melakukan penyederhanaan regulasi dan perizinan, akses pembiayaan, pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas teknologi, serta perluasan akses pasar sangat diperlukan. Tujuannya untuk mendorong pemerataan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik, dan meningkatnya taraf hidupnya. Hal ini, sekaligus menjadi langkah konkret dalam merealisasikan demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Pilar Kesejahteraan Masyarakat

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online* : 30-12-2024

KORESPONDENSI:
Nama : Nur Hikmah Mustari
E-mail : Nurhikmahm10@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.187
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Setiap negara atau wilayah tentunya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau malah sebaliknya, tujuannya agar mencapai kemajuan yang lebih baik lagi dibandingkan pada periode sebelumnya. Salah satu indikator utama dalam menilai pertumbuhan ekonomi adalah sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena berbicara persoalan kesejahteraan maka dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti kualitas kesehatan, peningkatan ekonomi, akses pendidikan, dan taraf hidup yang layak yang selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan serupa dengan negara-negara lain (Marcal et al., 2024; Sultan et al., 2023), di mana pemerintah dituntut untuk menrealisasikan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada pemerataan, pengelolaan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (Kurniawan et al., 2021). Berikut ini disajikan data pertumbuhan populasi sebagai gambaran untuk memahami tantangan yang akan dihadapi selanjutnya:

Tabel1. Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)
2019	266.911,9
2020	270.203,9
2021	272.682,5
2022	275.773,8
2023	278.696,2
2024	281.603,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya. Jika pertumbuhan populasi ini tidak diimbangi dengan pengembangan sumber daya yang ada serta penyediaan lapangan pekerjaan, hal tersebut berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata, terutama dengan kondisi *population density*. Kondisi ini sejalan dengan

teori Thomas Malthus (dalam Agustina et al., 2018) menyatakan bahwa kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat

Ketidakstabilan dalam pertumbuhan perekonomian dapat memicu berbagai masalah, termasuk meningkatnya angka kemiskinan. Sehingga berdampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima (Romhadhoni et al., 2019; Shavira et al., 2021). Dalam konteks ini, salah satu alternatif yang ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial adalah dengan memanfaatkan layanan pinjaman online. Data OJK per Desember 2023, sebanyak 18,07 juta orang tercatat memiliki utang di layanan pinjol, dengan total akumulai *outstanding* mencapai Rp59,64 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 16,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp51,12 triliun.

Ironisnya, layanan yang seharusnya dapat membantu masyarakat justru malah menimbulkan tragedi. Sebagai contoh, seorang IRT berusia 26 tahun di Lombok ditemukan tewas akibat gantung diri di rumahnya setelah meninggalkan surat yang menyatakan ketidakmampuannya untuk melunasi utangnya. Kasus serupa juga terjadi pada sebuah keluarga di Ciputat Timur, di mana sebelum ditemukan tewas, istri korban sempat membicarakan masalah utang pinjol (Sukma, 2024). Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, usia, tabungan, beban utang, dan lokasi tempat tinggal (Pohan & Yuliana, 2021).

BPS tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi pendapatan masyarakat. Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,41% dan menurun menjadi 9,22% pada September 2019. Namun, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, yang naik menjadi 9,78% pada Maret 2020 dan kembali meningkat menjadi 10,19% pada Maret 2021. Setelah itu, terjadi perbaikan pada September 2021 dengan penurunan menjadi 9,71%, lalu turun lagi menjadi 9,54% pada Maret 2022. Pada September 2022, angka kemiskinan sedikit meningkat menjadi 9,57%. Terakhir, pada Maret 2023, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 9,36% (Nisa et al., 2024). Fluktuasi ini menggambarkan dampak perubahan ekonomi, termasuk pemulihan pascapandemi, kebijakan pemerintah, serta tantangan struktural yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya penerapan strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika sektor perekonomian. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah melalui UMKM (Vinatra, 2023). Berdasarkan fakta bahwa variabel dalam perekonomian membentuk kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat harga pasar yang memengaruhi pemasukan, serta kondisi pendapatan, maka masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan, lebih mudah mengakses layanan publik, dan mengalami perbaikan dalam taraf hidup mereka (Sirait et al., 2024).

Dengan demikian, keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat serta peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat terus berkembang dalam sektor perekonomian. Pemerintah, yang notabenenya memiliki peran krusial sebagai pengarah, pendukung, dan pencipta kondisi yang kondusif, harus melaksanakan tugas tersebut dengan bijaksana. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia, sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai (Ismail et al., 2023; Pujiono, 2012). Untuk memberikan penjelasan yang lebih konkret dan jelas, hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub-bab hasil pembahasan.

TELAAH LITERATUR

UMKM selalu menarik untuk dikaji, tidak hanya dari aspek manajerial usaha, pemasaran, inovasi produk, dan keberlanjutan usaha (Mustari, 2024) tetapi juga karena peranannya yang sangat vital dalam perekonomian. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha ini berlandaskan pada prinsip-prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi (Zaman & Andriyanty, 2022). Berdasarkan Pasal 6, kriteria untuk mengklasifikasikan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro:
    a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil:
    a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah:
    a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu, UMKM dalam pertumbuhan ekonomi menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu negara, seperti (G. A. A. Putri & Islami, 2022) :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator PDB per kapita. PDB sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana semakin tinggi PDB, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, pertumbuhan PDB harus lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai contoh, jika pertumbuhan penduduk adalah 2% per tahun, maka PDB harus tumbuh lebih dari 2% per tahun (Aliyah, 2022; Hutagalung & Batubara, 2021; Sujarwadi et al., 2024);
2. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam proses produksi. Seiring dengan meningkatnya produksi dalam perekonomian, maka tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan. Hal ini akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan;
3. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan memiliki hubungan erat dalam memperbaiki kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang terjadi justru akan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan, di mana sebagian besar

masyarakat tetap berada pada tingkat pendapatan yang rendah, sementara kesenjangan semakin lebar.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al., (2020) mengenai defisit fiskal, ekspor, impor, dan jumlah UMKM, ditemukan bahwa UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010-2017. Jika hal ini tercapai, masyarakat tidak lagi merasa kekurangan dalam kemampuan ekonomi yang dimilikinya (Romadhoni et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian di *digital library*, situs web, dan koneksi jurnal perpustakaan. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam buku *Metode Penelitian Kepustakaan* oleh Mestika, (2004) metode ini melibatkan kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan koleksi perpustakaan, tanpa memerlukan riset lapangan. Jurnal-jurnal relevan diperoleh dengan pencarian menggunakan google browser dan google cendekia, dengan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu: UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pilar Kesejahteraan Masyarakat. Setelah data kepustakaan yang relevan terkumpul, hasil penelitian dianalisis lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan digunakan untuk memperkuat argumen mengenai peran UMKM sebagai pilar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab yang harus terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan dasar hidup masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik. Isu ini tetap menjadi persoalan yang relevan dan membutuhkan perhatian yang lebih adaptif serta tepat dari waktu ke waktu. Secara teoritis, hal ini dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah yang berfokus pada perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan, dengan tujuan akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat

melalui UMKM (Pedraza, 2021; Raharti et al., 2020). Sebagaimana data yang di uraikan di bawah ini:

Tabel 2. Data UMKM bagi Perekonomian Indonesia 2015-2019

Tahun	Jumlah UMKM (Juta)	Jumlah Tenaga Kerja	Penyerapan (Persen)	Sumbangan Terhadap PDB
2015	59.26	123.229.387	96.71	61,41
2016	61.65	112.828.610	97.04	59.84
2017	62.92	116.431.224	96.82	60.90
2018	64.19	116.978.631	97	61.07
2019	65.47	119.562.843	96.92	60.51

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI (Dalam Kiswandi et al., 2023)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Jumlah UMKM yang signifikan menjadi potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Edinburgh Group pada tahun 2013 (dalam Zaman & Andriyanty, 2022) mengungkapkan bahwa UMKM memiliki dampak yang sangat vital terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Oleh karena itu, UMKM tidak dapat dianggap remeh karena keberadaannya berpotensi mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata (Said & Azhar, 2021), dengan konstribusinya mencapai 97% dari total tenaga kerja (A. D. Putri et al., 2023). Tak hanya itu, UMKM menyumbang sebanyak 61% terhadap PDB yang setara dengan Rp9,580 triliun tahun 2023 (Ayuningtyas, 2024). Sehingga mampu menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan perekonomian (Riska & Nurlaila, 2024).

Mengingat kembali kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Peristiwa tersebut memberikan makna yang mendalam tentang sejarah perekonomian Indonesia. UMKM pada masa itu menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang mampu bertahan, dan bahkan mengalami pertumbuhan, sementara banyak perusahaan besar menghadapi kesulitan. Data BPS menunjukkan pasca krisis, UMKM justru mengalami peningkatan, dan mampu menyerap tenaga kerja antara 87 hingga 107 juta orang pada tahun 2012. Pada tahun 2016, UMKM tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,17%

dari 34,64% menjadi 38,81%, sementara sektor usaha skala besar mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%.

Hal tersebut mencerminkan bahwa UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memperkuat perannya sebagai pilar utama dalam perekonomian setelah krisis. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari krisis tersebut antara lain:

1. Ketergantungan Utang Luar Negeri: Ekonomi yang terlalu bergantung pada utang luar negeri terbukti rentan terhadap guncangan global. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih mandiri, dengan memperkuat sektor-sektor domestik dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri;
2. Ketimpangan Pola Pembangunan Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang terlalu terfokus pada perusahaan besar terbukti tidak cukup kuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang stabil dan inklusif. Sehingga penting untuk melibatkan UMKM dalam pembangunan ekonomi agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi;
3. Peran Penting UMKM: Meskipun sering kali kurang mendapat perhatian, UMKM mampu bertahan di tengah badai krisis dan bahkan berperan sebagai motor penggerak roda perekonomian. Dengan daya tahan dan fleksibilitasnya, UMKM menunjukkan pentingnya sektor ini dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan peluang lapangan kerja.

Dari krisis ekonomi, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian yang seharusnya terus didorong untuk berkembang. UMKM sejatinya memberikan kontribusi nyata di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. UMKM dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut (Khasanah, 2023):

1. *Livelyhood Activity*: Kelompok ini termasuk dalam sektor usaha informal, dengan tujuan utama untuk memperoleh penghasilan harian guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti pedagang kaki lima;
2. *Micro Enterprise*: Kelompok ini mencakup usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang. Namun, belum sepenuhnya menjalankan prinsip kewirausahaan dalam pengembahan sebuah usaha, contohnya pengrajin;
3. *Small Dynamic Enterprise*: Kelompok ini telah menunjukkan sikap kewirausahaan yang lebih kuat dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak atau bahkan

terlibat dalam ekspor. Mereka memiliki potensi untuk berkembang lebih besar lagi;

4. *Fast Moving Enterprise*: Kelompok ini memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan visi untuk memperluas jangkauan usahanya. Fokusnya adalah pada transformasi usaha ke dalam skala yang lebih besar dengan tujuan bersaing di pasar yang lebih luas.

Karena itu, UMKM memerlukan dukungan yang memadai dari berbagai pihak, terutama pemerintah agar mampu berkembang lebih luas dan optimal lagi. Mengingat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun, dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-4 terpadat di dunia, terdapat potensi besar munculnya ketimpangan ekonomi yang tidak merata. Dukungan yang dibutuhkan meliputi akses pembiayaan, pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas teknologi, dan perluasan akses pasar. Dengan adanya dukungan tersebut, UMKM dapat terus tumbuh dan berkontribusi sebagai pilar utama dalam meningkatkan perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat (Sarfiah et al., 2019).

Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan sektor UMKM, antara lain (Bank, 2020): (1) Meningkatkan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan sektor UMKM; (2) Memberikan kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil; (3) Menyusun pedoman untuk penerbitan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil; (4) Menyelaraskan kebijakan UMKM dengan penyusunan RPJMN; (5) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah; (6) Menetapkan klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Sejalan dengan itu, arah pertumbuhan ekonomi telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, terdapat beberapa peran strategis yang dimainkan oleh UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk membentuk kesejahteraan masyarakat, seperti (1) Berperan utama sebagai pelaku kegiatan perekonomian; (2) Berkontribusi menciptakan lapangan kerja; (3) Berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; (4) Berfungsi sebagai pencipta pasar dan ide baru; (5) Mendukung pertumbuhan pasar transaksi keuangan (Rambe et al., 2024; Vinatra, 2023).

PENUTUP

Setiap negara berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, dengan salah satu indikator utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak terkendali dapat memicu ketidakstabilan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan penurunan akses terhadap layanan publik. Sebagai contoh, seorang IRT di Lombok ditemukan bunuh diri akibat tekanan utang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi, pengelolaan populasi yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga penulis menekankan pentingnya peran strategis dalam menghadapi dinamika sektor perekonomian. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah penguatan sektor UMKM, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas dan merata, mencakup hingga 97% dari total tenaga kerja dan 61% terhadap PDB. Mengingat, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga dalam sejarah perekonomian. Pada masa tersebut, UMKM menunjukkan ketangguhannya dengan tetap bertahan bahkan mengalami pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja antara 87 hingga 107 juta orang pada tahun 2012. Pada tahun 2016, kontribusinya meningkat sebesar 4,17%, dari 34,64% menjadi 38,81%. Sementara banyak perusahaan besar menghadapi kesulitan sebesar 0,26%, dari 9,94% menjadi 9,68%. Hal ini menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian yang perlu terus didukung dan dikembangkan.

Oleh karena itu, UMKM membutuhkan dukungan yang memadai dari berbagai pihak, terutama pemerintah, agar dapat berkembang lebih optimal. Melihat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-4 terpadat di dunia, terdapat potensi besar munculnya ketimpangan ekonomi yang tidak merata. Dukungan yang diperlukan meliputi akses pembiayaan, pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas teknologi, dan perluasan akses pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan menikmati peningkatan taraf hidup. Semua ini sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

REFERENSI

Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(2), 265–283.

Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *3*(1), 64–72. https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719

Ayuningtyas, A. D. (2024). *Berapa Besar Konstribusi UMKM Atas PDB Indonesia?* GoodStats. https://goodstats.id/article/berapa-banyak-kontribusi-umkm-atas-pdb-indonesia-iZgHK#:~:text=Pada 2023, UMKM menyumbang sebanyak,ini juga terlihat secara global

Bank, A. D. (2020). *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: Country and Regional Reviews (Asia Small and Medium-sized Enterprise Monitor, 1)*. https://doi.org/10.22617/TCS200290-2

BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2019-2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html

Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan Defisit Fiskal, Ekspor, Impor Dan Jumlah UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, *5*(2), 151–161. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4907

Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3), 1–5. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878

Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM Dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, *7*(2), 208–217. https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344

Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, *1*(1), 11–18. https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2

Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jiem: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 154–162.

Kurniawan, B., Restia Sunarya, S., Naofal, F., & Mukdas Sudarjah, G. (2021). Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, *1*(3), 120–130. https://doi.org/10.23969/jrie.v1i3.19

Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(3), 40–47. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898

Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.

Mustari, N. H. (2024). Pengembangan SDM Dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Digital Marketing (Studi Kasus: UMKM Epiphany Food & Drink). *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 8–21. https://doi.org/10.32877/nr.v4i1.1767

Nisa, W. K., Simanjuntak, V. I., Kartika, S., & Fadila, A. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, *1*(3), 1–9. https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.220

Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. *Business and Management Research*, *10*(1), 33–44. https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33

Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2021*(1), 792–800. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1044

Pujiono. (2012). Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pendidikan. *Proceeding Seminar Nasional*, 319–326.

Putri, A. D., Permatasari, B., & Suwarni, E. (2023). Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk UMKM Kelurahan Labuhan Dalam BandarLampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, *4*(1), 119–123.

Putri, G. A. A., & Islami, F. S. (2022). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 312–327.

Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *6*(1), 36–53. https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364

Rambe, R., Ramadhani, G., & Akmala, T. F. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, *3*(3), 1–11.

Riska, E., & Nurlaila, L. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(1), 1–10.

Romadhoni, B. R., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *6*(3), 1074–1088. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, *14*(2), 115–122. https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.113-120

Said, S., & Azhar, A. (2021). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Bande Kecamatan Mpunda KOTA BIMA. *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, *4*(1), 29–41. https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.439

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, *4*(2), 137–146. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952

Shavira, S. O., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Bharanomics*, *1*(2), 93–103. https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.158

Sirait, E., Sugiharto, B. H., Jenal Abidin, Nely Salu Padang, & Johni Eka Putra. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(7), 3816–3829. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4160

Sujarwadi, A., Ramdani, R., & Rustini, T. (2024). Peran Kewirausahaan dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, *8*(1), 2754–2758.

Sukma, A. M. (2024). *Mereka Yang Nekat Bunuh Diri Karena Terlilit Pinjol*. Breaking News.

https://www.bisnis.com/read/20241217/638/1825026/mereka-yang-nekat-bunuh-diri-karena-terlilit-pinjol?utm_source

Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *5*(1), 77–85. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198

Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(3), 1–8.

Zaman, R. K., & Andriyanty, R. (2022). Analisis Pengembangan UMKM Terhadap Kesejahteraan Nasional. *Mediastima*, *28*(2), 96–114.